

**STRATEGI PERCEPATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

***STRATEGY FOR ACCELERATION OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX
(HDI) IN HULU SUNGAI UTARA REGENCY***

¹Siska Fitriyanti, ²Herry A. Pradana, ³M. Arief Anwar

^{1,2,3}Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

e-mail: fitriyantisiska@gmail.com

Diterima: 22/11/2019; Diperbaiki: 9/12/2019; Diterima: 16/12/2019

Abstrak

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki angka IPM paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten HSU telah berkomitmen dan melaksanakan program-program yang berhubungan dengan dimensi pembentuk IPM. Meskipun beberapa indikator dimensi IPM telah menampakkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi masih belum bisa merubah peringkat Kabupaten HSU sebagai pemilik IPM terendah di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya nilai IPM, menganalisis program dan daya dukung SKPD terkait untuk meningkatkan IPM, serta untuk memberikan usulan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan IPM. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pejabat struktural di SKPD yang berkaitan langsung dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Data sekunder berasal dari Laporan Tahunan dan Renstra tahun terakhir dari SKPD terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor utama rendahnya IPM Kabupaten HSU ada di sektor ekonomi, yaitu pengeluaran per kapita yang rendah. Adapun program dan daya dukung SKPD terkait sudah cukup baik dalam usaha meningkatkan angka IPM, hanya saja perlu difokuskan kepada peningkatan HLS dan RLS di sektor pendidikan, penurunan kasus gizi buruk dan pernikahan usia dini di sektor kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita di sektor ekonomi.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, IPM, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstract

Hulu Sungai Utara Regency is one of the regency in Kalimantan Selatan that have the lowest HDI rate among other regencies/cities. Over the past few years, the Government of Hulu Sungai Utara Regency has committed and implemented programs related to the dimensions of HDI. Although several indicators of the HDI elements have shown a significant increase, it is still unable move Hulu Sungai Utara Regency from the last place based on HDI. The study aims to identify the factors that cause low HDI scores, analyze programs and supporting capacity of government agencies related to HDI, as well as to propose programs that can improve HDI in Hulu Sungai Utara Regency. This research is descriptive with qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with structural officials in the government agencies that were directly related to the that were directly related to

the element of HDI. Secondary data was taken from the Annual Report and Strategic Plan of the latest year from the related government agencies. The results of the study show that the main factor of the low Hulu Sungai Utara Regency HDI exist in the economic sector, which is low per capita expenditure. Related programs and supporting capacity of those government agencies are already quite good in efforts to increase HDI. However, it needs to be more focused on increasing EYS and AYS in the education sector, decreasing cases of malnutrition and early marriage in the health sector, as well as increasing economic growth and per capita expenditure in the economic sector.

Keyword: Human Development Index, HDI, Hulu Sungai Utara Regency

PENDAHULUAN

Proses pencapaian keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pembangunan manusia yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak (Yembise 2018). Dimensi kesehatan diukur menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan diukur menggunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak (ekonomi) diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Indikator UHH merepresentasikan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan memiliki umur panjang; HLS dan RLS mencerminkan besarnya jumlah penduduk yang bersekolah serta capaian tingkat pendidikan; sedangkan pendapatan nasional bruto per kapita mencerminkan kemampuan untuk mencapai standar kehidupan yang layak.

Pembangunan manusia di Kalimantan Selatan terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018, IPM Kalimantan Selatan telah mencapai 70,17 atau masuk kategori tinggi. Angka ini meningkat sebesar 0,52 poin atau tumbuh sebesar 0,75% dibandingkan dengan tahun 2017. Selama periode 2017 hingga 2018, seluruh kabupaten/kota mengalami

peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kab. Barito Kuala (1,51%), Kab. Tanah Bumbu (1,35%), dan Kabupaten. HSU (1,32%) (BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2019). Meskipun Kabupaten. HSU termasuk kabupaten dengan pertumbuhan IPM yang paling cepat, akan tetapi masih berada di urutan terakhir dengan nilai IPM paling rendah di Kalimantan Selatan. Kontributor utama rendahnya nilai IPM Kabupaten. HSU ada di dimensi ekonomi dan dimensi kesehatan. Sedangkan dimensi pendidikan Kabupaten. HSU menunjukkan performa yang cukup baik. Angka HLS Kabupaten. HSU menempati posisi ke-3 setelah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Angka HLS Kabupaten. HSU (12,83) bahkan melampaui angka HLS Provinsi Kalimantan Selatan (12,50). HLS yang cukup tinggi mencerminkan bahwa banyak anak di usia sekolah tertentu menyelesaikan jenjang pendidikannya saat itu.

Secara umum Kab. Hulu Sungai cukup terkendala dengan wilayahnya yang didominasi perairan rawa sehingga cukup sulit untuk melakukan pemerataan pembangunan. Keterbatasan sarana transportasi untuk mengakses daerah-daerah tertentu di Kab. Hulu Sungai Utara menjadikan daerah tersebut masuk dalam kategori daerah tertinggal. Karakteristik wilayah juga rawa cukup berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Selain itu masih banyak ibu hamil di daerah luar perkotaan Kab. Hulu Sungai Utara yang masih memilih bidan

kampung untuk menangani proses bersalinnya. Meskipun keberadaan dukun kampung cukup membantu bagi sebagian masyarakat, namun jika ditinjau dari sisi medis hal ini relatif riskan dan masalah tersendiri dalam penanganan dan pemberian layanan kesehatan. Ketersediaan bidan kampung yang menjadi alternatif tenaga medis akan menurunkan jumlah persalinan yang ditolong tenaga medis. Hal ini berpotensi menyebabkan masih tingginya angka kematian bayi dan ibu di Kab. Hulu Sungai Utara.

Sejauh ini Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara sudah sangat serius dalam upaya meningkatkan IPM Kab. Hulu Sungai Utara, yang terbukti dengan tingginya angka percepatan IPM dari tahun ke tahun. Meski demikian percepatan ini masih belum bisa membuat Kab. Hulu Sungai Utara beranjak dari posisi terakhir, karena angka IPM sebelumnya sudah cukup jauh tertinggal dan kabupaten/kota lain pun terus bergerak naik dalam perolehan angka IPM mereka (Tabel 1).

Tabel 1. IPM Kalimantan Selatan 2013 – 2018

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Hulu Sungai Utara	61.32	62.49	63.38	64.21	65.06
Barito Kuala	62.56	63.53	64.33	64.93	65.91
Balangan	64.44	65.34	66.25	67.25	67.88
Kota Baru	65.76	66.61	67.10	67.79	68.32
Banjar	65.71	66.39	66.87	67.77	68.32
Hulu Sungai Tengah	65.37	66.56	67.07	67.78	68.32
Hulu Sungai Selatan	65.25	66.31	67.52	67.80	68.41
Tanah Laut	66.50	66.99	67.44	68.00	68.49
Tapin	66.99	67.67	68.05	68.70	69.53
Tanah Bumbu	66.94	67.58	68.28	69.12	70.05
Tabalong	68.36	69.35	70.07	70.76	71.14
Banjarmasin	74.94	75.41	75.94	76.46	76.83
Banjarbaru	77.30	77.56	77.96	78.32	78.83
Kalimantan Selatan	67.63	68.38	69.05	69.65	70.17

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama penyebab rendahnya IPM Kabupaten. HSU agar dapat menjadi dasar penyusunan program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang terkait dimensi IPM sebagai daya dukung peningkatan IPM. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara dalam fokus pembangunan,

penganggaran fokus pembangunan, dan SKPD yang melaksanakan fokus pembangunan dalam upaya meningkatkan IPM Kabupaten. HSU.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dilaksanakan di Kabupaten HSU pada tahun 2018. Data primer didapatkan dari wawancara dengan pejabat struktural di

SKPD Kabupaten. HSU yang terkait dengan sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi (standar hidup) sebagai variabel utama pembentuk IPM, yaitu: Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kantor Kementerian Agama; Bappelitbang; dan BPS. Sedangkan data sekunder diambil dari data yang ada di SKPD tersebut dan studi literatur terkait objek penelitian. Data dianalisis secara deskriptif eksploratif, dinarasikan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Kesehatan

Berdasarkan data BPS Prov. Kalimantan Selatan (2018), indikator UHH Kabupaten. HSU baru mencapai 62,94 tahun. Jauh di bawah angka rata-rata provinsi yang telah mencapai 68,02 tahun pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata derajat kesehatan di Kabupaten. HSU relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata derajat kesehatan daerah lain di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Program dan Data Dinas Kesehatan Kabupaten HSU, penyebab rendahnya derajat kesehatan ini antara lain disebabkan oleh perkawinan usia dini, minimnya pengetahuan kesadaran para ibu hamil untuk selalu mengontrol kondisi kehamilan ke tenaga kesehatan, hingga status gizi ibu hamil yang rendah yang berhubungan erat dengan tingkat kematian bayi dan balita, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yasril dan Mahmudah (2018), pernikahan dini, pertolongan persalinan non medis, dan komplikasi kebidanan berpengaruh terhadap tingkat kematian ibu.

Situasi kesehatan di Kabupaten. HSU juga sangat dipengaruhi oleh peran Pemerintah Daerah, kondisi wilayah, dan aspek sosial budaya masyarakat. Pemerintah Daerah berperan besar baik sebagai perencana, penggerak dan penyedia layanan kesehatan bagi

masyarakat. Kondisi wilayah juga turut mempengaruhi peta sebaran tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten. HSU. Meskipun sekarang puskesmas sudah ada di setiap kecamatan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kuantitas dan kualitas tenaga serta fasilitas kesehatan belum sama dengan daerah perkotaan. Untuk daerah yang akses transportasi terbatas, resiko pasien yang terlambat mendapatkan penanganan medis cukup tinggi.

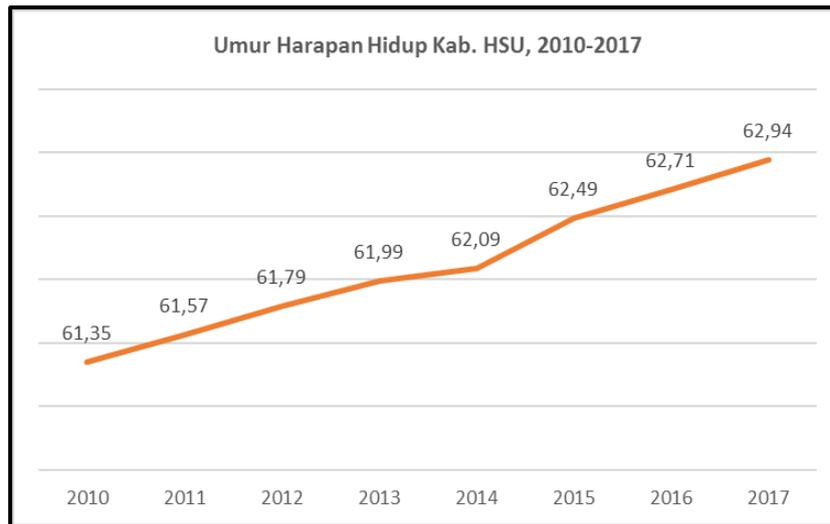
Kehidupan sosial budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat setempat turut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Mayoritas masyarakat di Kabupaten. HSU sangat enggan untuk berobat ke fasilitas atau tenaga kesehatan. Jika anak atau keluarga mereka sakit, maka pertolongan pertama adalah *tukang urut* atau bidan kampung. Kewaspadaan mengenai gejala penyakit yang muncul cukup rendah, sehingga tidak jarang pasien dibawa ke puskesmas atau rumah sakit saat kondisi sudah parah sehingga tak tertolong lagi. Selain itu masyarakat di Kabupaten. HSU kebanyakan memegang teguh tradisi atau kebiasaan masyarakat di masa lampau meskipun bertentangan dengan sudut pandang kesehatan. Contoh yang paling sering terjadi adalah kepercayaan bahwa ibu yang baru melahirkan hanya boleh memakan nasi dan ikan kering. Meski tenaga kesehatan sudah menjelaskan bahwa ibu yang baru melahirkan perlu berbagai asupan makanan, tetap saja kebiasaan lama dipertahankan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu isu nasional bahkan salah satu prioritas di program *Sustainable Development Goals* (SDG's). Salah satu hal yang bisa menurunkan tingkat AKI adalah Program Keluarga Harapan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial, yaitu program yang memfasilitasi dan mewajibkan ibu hamil yang terkategori rumah tangga miskin untuk memeriksakan kandungannya ke fasilitas kesehatan minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan (Susiana 2018). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan (2018), tercatat ada 6 (enam) kasus kematian ibu yang terjadi

pada tahun 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berbagai program bidang kesehatan telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten. HSU dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hasilnya UHH saat lahir terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten. HSU hanya sebesar

61,35 tahun. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat 1,59 tahun menjadi 62,94 tahun. Artinya, rata-rata pertumbuhan UHH Kabupaten. HSU adalah 0,37% per tahun. Pertumbuhan ini merupakan tertinggi kedua di bawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang tumbuh 0,56% pada periode yang sama, dan melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi yaitu 0,29% per tahun.



Gambar 1. UHH Kabupaten. HSU (2010 – 2017)

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agusrawati, dkk (2018), diketahui bahwa balita perempuan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan balita laki-laki, yaitu balita perempuan 68,2 tahun dan balita laki-laki 65,2 tahun. Di kisaran dewasa, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki harapan hidup tertinggi di kisaran usia 6 – 15 tahun, dan terendah pada usia di atas 66 tahun.

Indikator lain yang juga digunakan untuk melihat situasi kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*morbidity rate*) dan rata-rata lama sakit. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari pada periode sebulan terakhir sebelum pencacahan. Sedangkan rata-rata lama sakit merupakan rata-rata lama hari penduduk menderita keluhan kesehatannya. Keluhan kesehatan tersebut

antara lain, panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, ataupun keluhan kesehatan lainnya seperti lumpuh, pikun, stroke, mata katarak, dll. Semakin rendah angka kesakitan dan rata-rata lama sakit, semakin baik pula tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah tersebut.

Tabel 2. Angka Kesakitan dan Jumlah Hari Sakit di Kabupaten. HSU (2015-2017)

Tahun	Angka Kesakitan	Rata-Rata Lama Sakit (hari)
2015	19,87	4,98
2016	15,54	5,49
2017	10,40	4,43

Sumber: BPS (2018), Susenas 2015-2017

Angka kesakitan Kabupaten. HSU tahun 2017 sebesar 10,40%, artinya 10 – 11 orang dari 100 orang penduduk mengalami

keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data tersebut, dalam rentang waktu 2015 – 2017 angka kesakitan cenderung terus menurun. Hal ini merupakan indikasi bahwa ada tren peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten. HSU.

Berdasarkan hasil tersebut, maka upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten. HSU berada pada jalur yang tepat dan selaras untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yang disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Rekomendasi program SKPD untuk sektor kesehatan

Sasaran	Program	Kegiatan
Menurunkan kasus gizi buruk	1. Peningkatan layanan kesehatan balita	1. Sosialisasi dan penyuluhan pentingnya imunisasi terutama pada bayi dan balita. 2. Tindakan imunisasi selain di puskesmas juga bekerja sama dengan sekolah. 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kab. Hulu Sungai Utara 4. Penyebaran tenaga kesehatan khususnya ahli gizi secara merata dan proporsional dengan jumlah penduduk
	2. Peningkatan layanan kesehatan bagi keluarga	1. Pemberian layanan informasi kesehatan keluarga tentang bahaya gizi buruk 2. Pemberian konseling keliling desa yang rawan gizi buruk 3. Pemberian tambahan makanan sehat bagi rumah tangga miskin yang mempunyai balita 4. Pemberian sosialisasi rutin kesehatan lingkungan bersamaan dengan senam/olahraga di desa terpilih secara bergiliran
	3. Program peningkatan akses pelayanan kesehatan	1. Peningkatan penyediaan fasilitas transportasi bagi daerah dengan akses sulit. 2. Sosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan balita. 3. Peningkatan pelayanan RSUD.
Menurunkan kasus pernikahan dini	1. Edukasi dampak negatif menikah dini	1. Sosialisasi atau pemberian edukasi mengenai resiko pernikahan dini kepada orang tua. 2. Sosialisasi dampak negatif pernikahan dini dengan melibatkan tokoh agama pada kegiatan keagamaan.
	2. Pencegahan putus sekolah	1. Pemberian beasiswa untuk anak dari keluarga kurang mampu. 2. Pemberian fasilitas penunjang sekolah seperti sepeda bagi anak kurang mampu yang akses ke sekolah jauh.

Sumber: data primer yang diolah (2018)

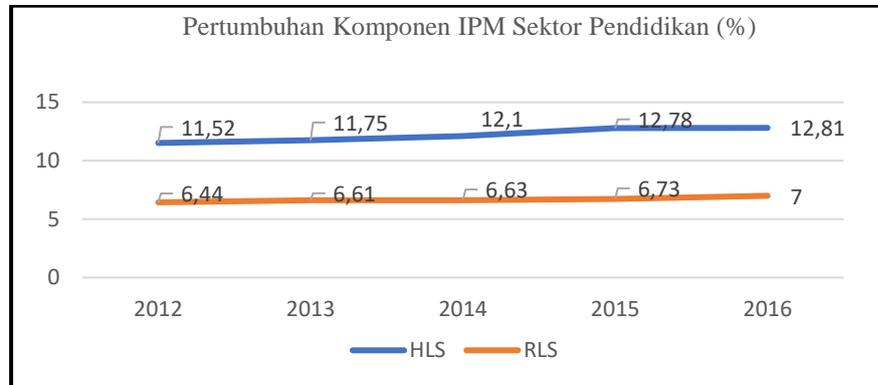
Dimensi Pendidikan

Rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten. HSU pada tahun 2017 adalah 7,19 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk di Kabupaten HSU menyelesaikan masa sekolahnya selama 7,19 tahun, atau hingga jenjang pendidikan

kelas 6 SD hingga kelas 1 SMP/MTs., sedangkan angka HLS pada tahun 2017 sebesar 12,82 tahun. Beberapa masalah yang masih ada di sektor pendidikan Kabupaten. HSU antara lain: rendahnya tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM),

rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD terhadap perkembangan berpikir anak, belum ada Perda Wajib Belajar 12 Tahun, tidak

meratanya fasilitas dan kualitas pendidikan, dan sebaran tenaga pendidik yang belum memperhatikan kebutuhan wilayah.



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan HLS & RLS Kabupaten. HSU
Sumber Data: BPS, 2017

Berdasarkan gambar di atas, dalam periode 2012 – 2016 HLS mengalami peningkatan sebesar 2,80% per tahun, dan RLS meningkat 2,17% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan Kabupaten. HSU sudah mengarah kepada pendidikan yang adil dan inklusif. Sebagai perbandingan data adalah pada periode tahun 2015 – 2016, Kabupaten HSU menempati urutan pertama pertumbuhan IPM tertinggi se-Kalimantan Selatan, yaitu pertumbuhan HLS 2,1% per tahun dan RLS 2,08% per tahun (Badan Pusat Statistik 2017). Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Program dan Data Dinas Pendidikan Kabupaten HSU, menajaknya tren angka HLS dan RLS salah satunya adalah adanya lembaga pendidikan non-formal berbasis PKBM di setiap kecamatan & 1 (satu) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di kabupaten. Adanya 2 (dua) lembaga ini meningkatkan jumlah penduduk di luar usia produktif yang dapat mengikuti program Kejar Paket A, B, dan C, sehingga statusnya menjadi penduduk yang memiliki latar pendidikan formal atau setara. Selain itu anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Kabupaten. HSU juga akan terdata memperoleh pendidikan formal

karena pesantren telah menyisipkan PKBM di program pendidikannya. Hal ini berdampak positif terhadap angka HLS maupun RLS. Jika semua lembaga pendidikan non-formal di Kabupaten. HSU berbasis PKBM, maka diperkirakan angka ini akan semakin meningkat.

Trend HLS dan RLS yang memiliki kecenderungan terus naik ini mengindikasikan bahwa program maupun kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten. HSU melalui Dinas Pendidikan telah berada di *track* percepatan yang benar. Langkah selanjutnya adalah mempertahankan program dan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan angka HLS dan RLS, serta menerapkan strategi ke dalam program-program yang akan disusun sebagai upaya mengatasi kendala yang ada di sektor pendidikan. Rekomendasi strategi disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rekomendasi Program untuk Sektor Pendidikan

Sasaran	Program	Kegiatan
Meningkatkan Angka RLS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan payung hukum/ regulasi tentang pelaksanaan juknis Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2. Peningkatan kuantitas tenaga pendidik PAUD 3. Peningkatan program sosialisasi PAUD di kawasan pedesaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan regulasi penerimaan siswa baru berdasarkan Juknis PSB. 2. Menambah jumlah tenaga pendidik PAUD yang didistribusikan merata ke seluruh wilayah kabupaten. 3. Sosialisasi peran PAUD di tahapan tumbuh kembang anak.
Meningkatkan Angka HLS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perda Wajib Belajar 12 Tahun 2. Menambah jumlah beasiswa transisi antar jenjang sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan Perda Wajib Belajar 12 tahun. 2. Meningkatkan beasiswa terhadap anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu
Meningkatkan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan SK/Peraturan Bupati mengenai tata cara/prasyarat yang harus dipenuhi untuk penempatan /mutasi guru. 2. Melengkapi data tenaga pendidik dan kebutuhan wilayah terhadap tenaga pendidik. 3. Dana insentif guru daerah terpencil. 4. Rehabilitasi infrastruktur & pemenuhan sarana prasarana sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang regulasi ketentuan penempatan guru, dan konsekuensi jika tidak mematuhi regulasi. 2. Pendataan berbasis digital. 3. Pemberian tunjangan bagi guru di daerah terpencil. 4. Monitoring kebutuhan rehabilitasi dan sarana prasarana sekolah.

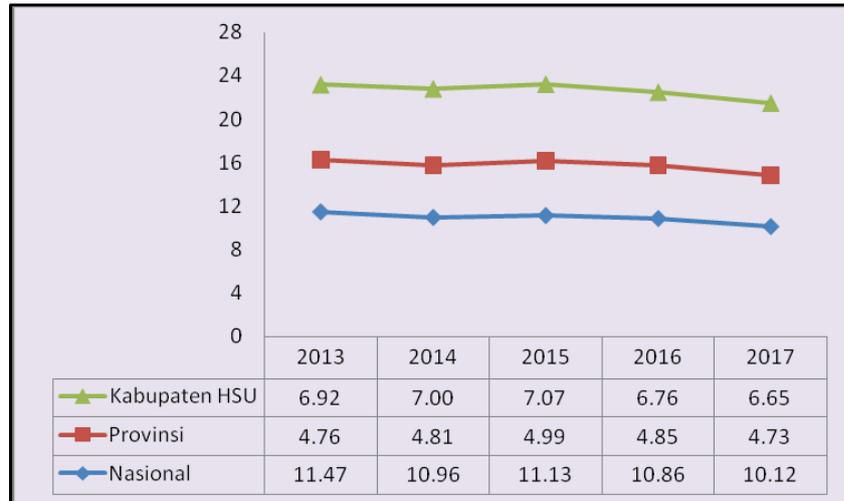
Sumber: data primer yang diolah (2018).

Dimensi Standar Hidup Layak (Ekonomi)

Kondisi lahan rawa yang mendominasi terhadap wilayah di Kabupaten. HSU berpengaruh signifikan terhadap sektor perekonomian. Berdasarkan data Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, Kabupaten. HSU masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, Disusul sektor perdagangan besar dan eceran yang cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke arah perdagangan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2017, diketahui bahwa PDRB

Kabupaten. HSU pada tahun 2010 dari Rp. 2.039.850,75 dan di tahun 2017 menjadi Rp. 2.978.395,49 juta. Dari data tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten. HSU pada tahun 2017 adalah 5,8%, naik dibanding tahun 2016 yang baru mencapai 4,7%. Angka ini membuat Kabupaten. HSU berada di posisi ke-4 dalam laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.

Adapun kondisi kemiskinan yang berpengaruh terhadap indikator dimensi ekonomi sejak tahun 2013 terus menurun hingga tahun 2017, meski demikian masih berada di atas tingkat kemiskinan Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional, yang disajikan pada gambar berikut:

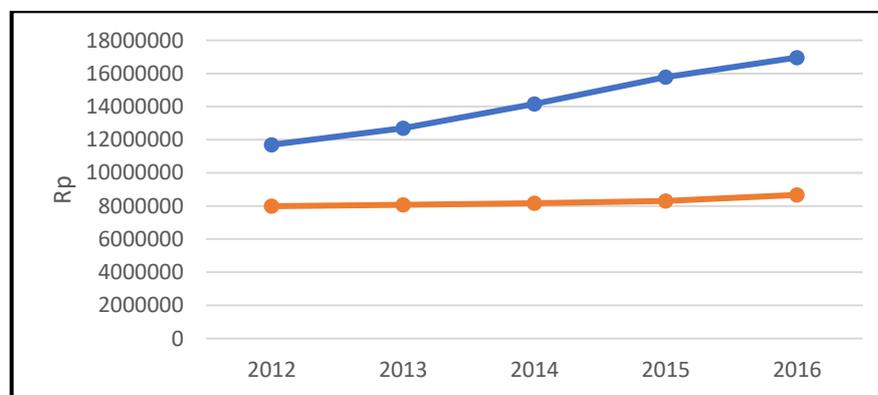


Gambar 2. Grafik angka tingkat kemiskinan (%)

Sumber: Dokumen RPJMD Kab HSU

Berbagai program telah dilakukan Pemerintah Kabupaten HSU dalam rangka mendongkrak perekonomian daerah. Program-program tersebut tersebar di seluruh SKPD teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UMKM. Jika dilihat dari tren angka kemiskinan yang terus menurun

dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, serta peningkatan pendapatan per kapita yang cukup tinggi, maka seharusnya sektor ekonomi di Kabupaten HSU berada dalam kondisi yang baik pula. Akan tetapi, hal ini tidak didukung oleh pengeluaran per kapita yang ternyata masih rendah seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Pendapatan & Pengeluaran Per Kapita Kabupaten. HSU

Sumber Data: BPS, 2017

Salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui percepatan pembangunan. Pembangunan infrastruktur memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi (Pambudy and Syairozi 2019). Di Kabupaten. HSU memang belum terlihat adanya pembangunan atau perubahan

infrastruktur yang signifikan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Pambudy dan Syairozi (2019) mengungkapkan bahwa realisasi belanja modal yang meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang juga sejalan dengan hasil penelitian Fawwaz (2015),

Devarajan dan Shantayanan (2013) dan Hendarmin (2012).

Salah satu indikator standar hidup layak adalah meningkatnya pengeluaran per kapita. Kondisi di Kabupaten. HSU dimana pendapatan per kapita menanjak naik tetapi pengeluaran per kapita stagnan cenderung rendah merupakan suatu anomali. Hal ini terjadi

kemungkinan disebabkan faktor budaya masyarakat Kabupaten. HSU yang cenderung hemat dan tidak terlalu konsumtif terhadap barang-barang di luar kebutuhan pokok. Oleh karena itu diperlukan upaya lain untuk meningkatkan sektor perekonomian di Kabupaten. HSU yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Rekomendasi Program untuk Sektor Ekonomi

Sasaran	Program	Kegiatan
Menurunkan angka kemiskinan	Pemberdayaan BUMDes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi peran dan manfaat BUMDes bagi perekonomian desa 2. Pembinaan SDM pengelola BUMDes. 3. Pendampingan pendirian BUMDes sesuai potensi desa.
Memperluas lapangan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi sektor kreatif unggulan daerah. 2. Pengembangan UMKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kajian akademis untuk menentukan sektor kreatif yang diunggulkan daerah. 2. Pembinaan SDM UMKM dalam hal manajemen dan diversifikasi usaha. 3. Promosi produk UMKM. 4. Membuka akses pasar modern bagi produk UMKM.
Mendorong peningkatan pengeluaran per kapita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi pasar rakyat. 2. Membuka akses terhadap pasar modern untuk meningkatkan daya saing sektor perdagangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi infrastruktur pasar. 2. Peningkatan manajemen dan tata kelola pasar. 3. Pembinaan SDM pengelola pasar rakyat. 4. Menyelenggarakan kajian akademis dampak positif & negatif pasar modern terhadap daerah.

Sumber: data primer yang diolah (2018).

SIMPULAN & REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas, faktor utama penyebab IPM Kabupaten. HSU berada di posisi terakhir di antara kabupaten/kota di Kalimantan Selatan ada di dimensi ekonomi, dimana pengeluaran per kapita cenderung stagnan dan relatif rendah, dan tingkat kemiskinan yang masih cukup jauh berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan. Usaha dari Pemerintah Kabupaten. HSU sudah cukup banyak untuk mendongkrak elemen-elemen yang berpengaruh

terhadap angka IPM. Hal ini terbukti dari meningkatnya HLS dan RLS di dimensi pendidikan, meningkatnya UHH dan menurunnya angka morbiditas di dimensi kesehatan, serta meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di dimensi ekonomi. Program dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh SKPD terkait harus berfokus pada usaha peningkatan HLS dan RLS, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penurunan kasus gizi buruk, mengurangi jumlah kasus pernikahan usia dini, pemberdayaan BUMDes dan UMKM, serta membuka peluang terhadap pasar modern.

Rekomendasi

Perbaikan di ketiga dimensi pembentuk IPM bersifat investasi jangka panjang. Oleh karena itu, untuk melihat hasil yang optimal memang dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 tahun ke depan. Meski demikian, jika program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten HSU tetap berfokus pada unsur-unsur yang memerlukan perbaikan, maka bisa diperkirakan bahwa angka IPM akan bergerak maju. Selain itu juga perlu disadari oleh para pemangku kebijakan bahwa peringkat bukanlah penentu kualitas, yang lebih penting adalah tingkat kategori yang dapat dicapai oleh angka IPM Kabupaten HSU nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota se Jawa - Bali)." *Simposium Nasional Akuntansi*. Padang.
- Agusrawati, Makkulau, Irma Yahya, and Sainal Abidin. 2018. "Deskripsi Status Kesehatan Masyarakat Kota Kendari Berdasarkan Hasil Registrasi Penduduk." *Seminar Nasional Teknologi Terapan Berbasis Kearifan Lokal*. Makasar: UIN Alaudin Makasar. 555 - 560.
- AL-Fawwaz, and M Torki. 2015. "The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Jordan (1980 - 2013)." *International Business Research* 9 (1).
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Booklet Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: BPS.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 2019. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018*. Berita Resmi Statistik, Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan.
- Devarajan, and Shatayanan. 2013. "The Composition of Public Expenditure and Economic Growth." *Journal of Monetary Economics* 37 313 - 344.
- Hendarmin. 2012. "Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat." *JEKSOS* 8 (3) 144 - 155.
- Pambudy, Akhli Priya, and Muhammad Imam Syairozi. 2019. "Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat." *Ekobis* 20 (1) 26 - 39.
- Susiana, Sali. 2018. "Peran Program Keluarga Harapan Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 10 (1) 19 - 31.
- Yasril, Abdi Iswahyudi, and Mahmudah. 2018. "Analisis Jalur Faktor Angka Kematian Ibu Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014." *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 7 (2) 149 - 159.
- Yembise, Susana Yohana. 2018. "Kata Pengantar." In *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018*, by Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.